

## KOTA BERKELANJUTAN: ANTARA IDE DAN IMPLEMENTASI DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN<sup>1</sup>

**Kurnia Novianti**

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR-LIPI)  
Gedung Widya Graha, 21 Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan  
kurnia.novianti@yahoo.com

### **Abstrak**

*Tulisan ini memotret perspektif para pemangku kepentingan tentang konsep kota berkelanjutan di dua kota, yaitu Rotterdam dan Jakarta. Kota berkelanjutan sangat menarik diperdebatkan mengingat konsep ini relatif baru diwacanakan oleh para akademisi dan praktisi pembangunan di Indonesia. Konteks pembangunan berkelanjutan yang sejumlah indikatornya harus dipenuhi oleh Indonesia setelah mengadopsi sustainable development goals yang menempatkan kota sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial-budaya masyarakat, dan keseimbangan lingkungan akan terpenuhi melalui kota berkelanjutan. Dengan metode kualitatif berupa wawancara, diskusi terfokus, dan pengamatan selama berada di Rotterdam pada bulan Mei 2015. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemangku kepentingan tentang 'kota berkelanjutan'. Hasil yang diperoleh adalah informan menggunakan perspektif yang beragam dalam memaknai 'kota berkelanjutan'. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan dan pemahamannya tentang kota berkelanjutan. Pendekatan governmentality penulis gunakan untuk memahami bagaimana idea dan practices tentang 'kota berkelanjutan' muncul dan terimplementasi baik di Rotterdam maupun Jakarta dalam implementasi pembangunan kota berkelanjutan.*

**Kata kunci:** kota berkelanjutan, pemangku kepentingan, pembangunan berkelanjutan, governmentality

## **SUSTAINABLE CITY: BETWEEN IDEA AND IMPLEMENTATION IN STAKEHOLDERS PERSPECTIVES**

### **Abstract**

*This article highlights the perspectives of stakeholders about the concept of sustainable city in two cities, Rotterdam and Jakarta. Sustainable city is very interesting to discuss since this concept is relatively new in discussions among scholars and development experts or professionals in Indonesia. Sustainable development concept that Indonesia adopted through the indicators of sustainable development goals which has been endorsed by the world community (United Nations) positioned cities as one of the major pillars in sustainable development for a harmonization of economic growth, social welfare, and the environmental balance will be realized through sustainable cities. Through the qualitative method with depth interview, focus discussion, and observation during the research field in Rotterdam on May 2015, this article aims to analyze the perspectives of the stakeholders about sustainable city. The result of this research is the description of diverse perspectives that had been used by the informants to interpret the concept of 'sustainable city'. Those are motivated by their interest and understanding of the concept. The approach of governmentality is being used by the author to help to understand how ideas and practices of sustainable city appeared and implemented in Rotterdam and Jakarta.*

**Keywords:** sustainable city, stakeholders, sustainable development, governmentality

---

Naskah Masuk : 10-10-2016	Revisi 1 : 19-10-2016	Revisi 2 : 30-10-2016	Revisi Akhir : 5-11-2016
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

---

<sup>1</sup> Tulisan ini menggunakan data penelitian yang dilakukan oleh Tim Kota Berkelanjutan di Kelompok Penelitian Eropa, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI).

## **I. PENDAHULUAN**

Isu tentang kota tidak terlepas dari pertumbuhan kota yang begitu pesat dalam kurun waktu beberapa dekade. Tulisan-tulisan ilmiah sosial yang dihasilkan para akademisi pemerhati kota mencatat bahwa mobilisasi manusia dari desa ke kota sangat terlihat jelas. Secara statistik jumlah kota meningkat dan penduduk yang tinggal di dalamnya mencapai hingga 75% bahkan lebih (Rees dan Wackernagel, 1996: 223). Fenomena ini kemudian juga dikaitkan dengan revolusi industri, di mana terbukanya peluang untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Perhatian kemudian tidak hanya diarahkan pada semakin bertambahnya jumlah kota (sebagai entitas geografis dan kultural yang diciptakan) tetapi juga pada dampak yang dimunculkan. Paling tidak ada 3 hal penting yang dimunculkan menurut Lundqvist (2007: 5) yaitu pertama, kota menghapus sisi spasial orang dari lahan produktif dengan membuat mereka bergantung pada sumber daya di pedesaan. Kedua, ketika merencanakan membangun kota dengan prinsip-prinsip yang didasari pada ide-ide bahwa air, udara, dan sumber daya alam yang lain bersifat bebas bagi semua orang, hal ini justru menimbulkan masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia dan kualitas hidup. Ketiga, kota merupakan refleksi dari nilai-nilai yang tertanam dalam konstruksi hukum yang di dalamnya terdapat masyarakat, yang menjadi sulit untuk membuat perubahan mendasar.

Akibatnya kota muncul sebagai entitas yang paradoks. Di satu sisi, ia menyediakan kesempatan ekonomi secara global namun di sisi lain memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan, baik di dalam maupun di luar batas-batas mereka. Oleh karena itu, pertanyaan besar yang diajukan adalah seberapa besar ancaman yang disebabkan oleh kota terhadap ekosistem global? Apakah memungkinkan untuk membuat kota lebih berkelanjutan? (Newman and Jennings, 2008: 2-3). Seberapa penting menjadi kota yang memiliki keberlanjutan dan bagaimana para pemangku kepentingan memaknai keberlanjutan menjadi hal-hal yang diperdebatkan dalam tulisan ini.

## **II. KOTA BERKELANJUTAN: BAGIAN DARI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?**

Konsep kota berkelanjutan dalam Hassan dan Lee (2014: 5) merupakan kota mandiri, yang dapat mengembalikan kita ke kondisi pertama yaitu “memproduksi untuk dikonsumsi”. Gagasan kota berkelanjutan telah muncul sebagai inisiatif politik dalam menanggapi degradasi yang terjadi di lingkungan perkotaan sepanjang abad kedua puluh. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia adalah prioritas utama dari konferensi PBB yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972; PBB mendirikan pusat pemukiman manusia pada tahun 1978 untuk mempromosikan dan mendukung tren berkelanjutan di masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kini kota berkelanjutan atau kota utopis mencapai luar skala bangunan individu dan meluas ke seluruh kota.

Program kota berkelanjutan PBB telah mendefinisikan kota berkelanjutan sebagai salah satu yang mampu mempertahankan pasokan sumber daya alam sementara kemajuan ekonomi, fisik, dan sosial tercapai, dan sisanya aman terhadap risiko lingkungan yang dapat merusak pembangunan (Hassan dan Lee, 2014: 5). Dengan demikian, kota berkelanjutan menjadi konsep yang komprehensif namun sangat sulit terwujud, mengingat begitu kompleksnya unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dari beberapa definisi yang berhasil penulis eksplorasi, konsep ini memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Dalam perdebatan akademis, muncul sebuah kritik dari Drilling (2013: 103-104) tentang upaya mencapai keharmonisan tiga dimensi besar ekonomi, sosial, dan lingkungan- dalam kota berkelanjutan. Ia menyebut bahwa dalam konteks pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, terdapat tiga posisi yang sangat menarik yaitu pertama, tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi tidak dapat digabungkan karena tujuan ekonomi selalu menargetkan pertumbuhan, dan tujuan ekologi selalu menargetkan batas; kedua, pilihan untuk memenuhi tujuan perlindungan lingkungan (perlindungan ekosfer), stabilitas ekonomi (pembangunan ekonomi terus stabil), dan keadilan sosial (peluang kelangsungan hidup yang sama) secara bersamaan dan dengan nilai yang sama memungkinkan untuk menjadikannya sebagai strategi tindakan yang berorientasi pada masa depan; dan ketiga, pendekatan keberlanjutan adalah strategi pengamanan dominasi modern. Selain itu ini dianggap merupakan bagian dari konsep hegemoni baru karena tidak memperhitungkan hubungan kekuasaan antar-subjek yang merupakan dasar dari kerusakan lingkungan dan munculnya kemiskinan. Dalam hal ini, keberlanjutan tidak banyak memberi perubahan dari konsep sebelumnya.

Memahami dimensi kota berkelanjutan adalah masalah yang kompleks. Hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks keberadaan kota-kota adalah latar belakang budaya dan perbedaan di tingkat nasional maupun regional. Jenks dan Colin (2010: 5) menganalisis bahwa ada perbedaan yang signifikan di berbagai belahan dunia tentang penafsiran kota yang berkelanjutan namun ada hal umum yang mendasari dan topik yang selalu muncul dalam perdebatan tentang kota berkelanjutan serta pengakuan tentang bentuk perkotaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa tidak mungkin ada solusi spasial atau fisik yang bersifat tunggal, tetapi mungkin ada banyak bentuk yang dapat muncul sebagai upaya mencapai keberlanjutan, tergantung pada konteks di mana mereka diterapkan.

Perdebatan ini menjadi menarik sekaligus rumit karena dalam isu kota berkelanjutan terdapat 2 konsep besar yang sebetulnya telah lama diperdebatkan oleh para akademisi di dunia; kota dan keberlanjutan. Kota, sebagaimana telah disebutkan di awal, menjadi tempat bagi lebih dari 70% populasi di dunia untuk mencari penghidupan yang layak sementara kapasitasnya terbatas. Dalam hal ini Lundqvist (2007: 5) memandang bahwa kota memiliki sisi positif selain kepadatan manusia di suatu kawasan dengan luas yang terbatas. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik kota dapat mendukung upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara memberikan manfaat secara ekonomi dan kesehatan.

Disisi lain Natter dan Zierhofer (2002: 227) mengatakan bahwa modernitas membentuk gaya hidup manusia di perkotaan. Fenomena urbanisasi menjadikan manusia berfikir tentang tata ruang yang dikhususkan untuk dirinya. Urbanitas, memaksa manusia untuk mendefinisikan ukuran yang tepat untuk dirinya dalam konteks *modern space* dengan meminimalisir pertimbangan tentang aspek "*non-human*". Modernitas menempatkan pembagian *living spaces* ini menjadi ekstrim dan kota dianggap sebagai pusat dari produksi ide dan budaya.

Lalu bagaimana konsep keberlanjutan dikaitkan dengan kota? Keberlanjutan sendiri bukanlah konsep yang baru muncul karena ternyata ia telah dipopulerkan sejak abad ke-19 meskipun bukan merupakan isu yang muncul ketika terjadi ekspansi yang lebih berkembang pada masa selanjutnya. Perhatian kemudian terfokus pada kondisi kota-kota yang tidak berkelanjutan dan masalah-masalah yang disebabkan oleh perpindahan penduduk yang sangat masif ke kota. Isu-isu inilah yang memotivasi para perencana pembangunan, *geographer*, dan pemerintah untuk mencari jalan keluar atas

permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui pembangunan berkelanjutan (Hassan dan Lee, 2014: 2).

Pembangunan berkelanjutan, sebagai sebuah konsep merupakan hasil pemikiran para sarjana Barat yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai wacana. Konsep ini kemudian menjadi “krusial dan mendesak” karena menghubungkan antara kondisi yang dirasakan saat ini dengan masa depan, di mana generasi mendatang memiliki hak untuk menikmati sumber daya yang dirasakan semakin menipis. Oleh karena itu, muncullah pemikiran untuk menyeimbangkan kemajuan di bidang ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek sosial masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai “perkembangan atau pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Definisi lain tentang pembangunan berkelanjutan yaitu proses dinamis yang menghubungkan keprihatinan lokal dan global, serta menghubungkan isu-isu sosial, ekonomi, dan ekologi lokal, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan (Hassan dan Lee, 2014: 3).

Keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep-konsep yang statis atau merupakan proses yang terbatas melainkan selalu berubah dan bersifat multi-interpretasi, serta melibatkan proses yang terus berjalan dan mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk proses-proses produksi dan sistem ekologi. Kini sebagian proses yang terjadi dalam kehidupan di kota mungkin terhubung dengan keberlanjutan. Kerumitan konsep keberlanjutan mendesak pemerintah UK untuk menggunakan definisi Brundtland secara resmi tentang “pembangunan berkelanjutan” sebagai upaya mencapai “kehidupan yang lebih baik” (Choi dan Ahn, 2013 dikutip dari Hassan dan Lee, 2014: 3).

#### A. Belajar dari Rotterdam tentang Makna Keberlanjutan

Kota ini dipilih menjadi lokasi penelitian berdasarkan alasan akademis dan praktis. Berdasarkan *press release* yang dikeluarkan oleh *Rotterdam Partners* tanggal 7 April 2014, Rotterdam terpilih menjadi salah satu *Smart City* 2014. Majalah *The New Economy* menganugerahkan penghargaan “Smart Cities Awards” kepada 20 kota di seluruh dunia yang memenuhi kualifikasi sebagai ‘kota masa depan’ dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *The New Economy* memberikan penghargaan yang tinggi kepada Rotterdam atas upayanya memelihara kotanya menghadapi ancaman perubahan iklim dan mendukung citra kota tersebut sebagai kota pelabuhan paling berkelanjutan di dunia.



Foto 1 dan 2. Erasmusbrug, simbol Kota Rotterdam dan keseharian masyarakat Rotterdam menggunakan sepeda sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Sumber: Penelitian lapangan tanggal 18 dan 20 April 2015.

Foto pertama adalah jembatan Erasmus, yang mengubungkan bagian utara dan selatan kota Rotterdam, merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai simbol kota yang mengedepankan modernitas dan inovasi. Panjang jembatan ini 800 meter dan dibangun dengan memadukan arsitektur dan seni. Rotterdam merupakan salah satu kota yang cukup terkenal bidang arsitekturnya. Oleh karena itu, menjadi menarik mengamati bangunan ini karena tidak hanya berfungsi untuk memperlancar jalannya roda perekonomian, mengingat Rotterdam adalah kota yang memiliki pelabuhan terbesar di Belanda yang merupakan kota industri dan perkantoran, tetapi juga mengharmonisasikannya dengan keindahan arsitektur.

Sementara itu, foto kedua adalah pemandangan sehari-hari masyarakat Rotterdam dan kota-kota lain di Belanda dalam memanfaatkan alat transportasi. Infrastruktur yang memadai bagi para pengguna sepeda memungkinkan mereka lebih memilih alat transportasi tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Selain murah dan menyehatkan, menggunakan sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap beracun seperti kendaraan bermotor. Penggunaan alat transportasi ramah lingkungan menjadi salah satu upaya mendukung program kota berkelanjutan dimana tingkat polusi udara dapat ditekan seminimal mungkin sehingga udara yang dihirup menjadi lebih bersih.

Pelajaran ini menjadi penting mengingat Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengimplementasikan pembangunan kota berkelanjutan. Kota-kota di Indonesia menghadapi permasalahan yang luar biasa kompleks, mulai dari kepadatan populasi yang semakin tak terkendali hingga dampak perubahan iklim yang menyebabkan kerentanannya semakin tinggi. Jakarta, sebagai ibukota negara yang juga merupakan kota terpadat di Indonesia menghadapi tantangan dalam pembangunan kota berkelanjutan. *Kompas online* tanggal Jumat, 13 Februari 2015 menyebutkan bahwa Jakarta menempati posisi sepuluh terbawah dalam indeks kota berkelanjutan atau *Sustainable Cities Index 2015* yang dirilis ARCADIS. Ibu kota Indonesia ini sejajar dengan Doha, Moskow, Jeddah, Riyadh, Manila, Mumbai, Wuhan, New Delhi, dan Nairobi.<sup>2</sup> Dalam konteks ini upaya-upaya Rotterdam dalam mengimplementasikan pembangunan kota berkelanjutan dapat menjadi inspirasi bagi Jakarta.

Salah satunya adalah upaya Rotterdam dalam memperbaiki berbagai infrastruktur kotanya untuk menghadapi banjir baik akibat luapan air laut maupun hujan melalui *water plazas* dan *green roofs*. Selain itu, kota ini juga dinilai berhasil membangun jaringan transportasi kota yang dinyatakan sebagai salah satu contoh paling baik di Eropa. Rotterdam kemudian boleh berbangga dengan predikat sebagai ‘*smart city*’ karena mampu memanfaatkan teknologi terkini untuk mewujudkan kota yang semakin siap menghadapi tantangan alam.<sup>3</sup>

Berkolaborasi dengan beberapa mitra yang cukup terkemuka, Rotterdam membentuk sebuah Strategi Adaptasi Perubahan Iklim (*Climate Change Adaptation Strategy*) yang menggunakan pendekatan-pendekatan inovatif yang kini banyak ditiru oleh negara-negara di seluruh dunia. Sistem penyimpanan air di bangunan-bangunan baru, khususnya yang dirancang dalam *water plaza*, berkapasitas sekian meter kubik dari atap-atap yang dibangun dan pusat pengetahuan tentang

---

2 Dapat diunduh di <http://properti.kompas.com/read/2015/02/13/060000621/Jakarta.Sepuluh.Terbawah.Kota.Berkelanjutan.Dunia>. Diakses tanggal 25 Agustus 2016.

3 Pernyataan Walikota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, terkait keberhasilan tersebut yaitu: “*In conjunction with universities and colleges and the corporate world, our region is finding solutions to the challenges that increasingly face all modern urban areas. A good example is Rotterdam’s approach to water, which has made it the most prominent and innovative water-knowledge city in the world, as well as an inspiring example to other delta cities.*” (Heinen, 2014: 1-2).



konstruksi mengapung menunjukkan bagaimana lingkungan perkotaan yang padat penduduk seperti Rotterdam dapat merespon air hujan dalam kuantitas besar dan tingginya air laut dengan cara yang cerdas. Seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 1. *Water Plaza* di Benthemplein, Rotterdam yang diklaim sebagai penampung air (*water square*) pertama terbesar di dunia. Sumber: RCI, 2012.

permukiman warga yang bernama the Agniese. Tujuan pembangunannya adalah mengurangi risiko terjadinya banjir dan menjadi lokasi di mana warga dapat bertemu dan memanfaatkan ruang terbuka tersebut untuk berolah raga dan berekreasi. Meskipun mendapat kritikan dari beberapa akademisi karena lokasinya yang tidak terlihat dari jalan raya sehingga terkesan terpencil, namun bangunan ini diyakini menjadi investasi yang sangat penting bagi Rotterdam dalam upaya mitigasi bencana.

*Water plaza* hanya satu diantara beberapa program kota berkelanjutan yang diimplementasikan di Rotterdam. *The Rotterdam Climate Initiative* (RCI)<sup>4</sup> menyatakan bahwa organisasi ini bertujuan untuk menjadikan Rotterdam sebagai kota yang menginspirasi *delta cities* lain di dunia untuk melewati masa transisi menuju keberlanjutan. Hingga tahun 2030 organisasi dan para mitranya ini memiliki 3 ambisi besar, yaitu:

1. Komitmen pada perwujudan kota yang hijau, sehat, dan tangguh. Warga Kota Rotterdam hidup dalam kota yang menarik, hijau dengan kualitas hidup yang sangat baik, dan udara yang bersih. Kota ini menggunakan alat transportasi yang lebih ramah lingkungan, yaitu sepeda, alat transportasi massal atau kendaraan-kendaraan elektrik. Salah satu hal penting dalam pembangunan kota berkelanjutan adalah memaksimalkan pelayanan transportasi publik yang ramah lingkungan.
2. Investasi pada energi bersih dengan biaya yang lebih rendah. Rotterdam menghasilkan lebih banyak energi terbarukan dari total konsumsi daya kota saat ini. Kota dan kompleks pelabuhan telah memiliki kemitraan yang berhasil mengelola sisa uap panas dari proses pemanasan di pelabuhan sehingga mampu memberikan panas dan mendinginkan setidaknya setengah dari seluruh rumah dan bangunan. Energi surya dan angin ditambah penghematan energi akan menghasilkan tagihan energi yang lebih rendah bagi warga Rotterdam pada tahun 2030 tanpa

Selain itu, ukuran-ukuran tersebut berkontribusi terhadap penghijauan di luar ruangan dan menciptakan pemandangan yang lebih menarik bagi penduduk di sekitarnya. Rotterdam menjadikan hal tersebut sebagai uji coba guna menghasilkan solusi-solusi yang bersifat inovatif dimana kota-kota lain di dunia dapat mengambil manfaat dari upaya tersebut (Heinen, 2014: 1-2). *Water plaza* juga diperuntukan sebagai tempat pertemuan warga yang tinggal di sekitarnya karena bangunan ini berada di antara kampus the Zadkine and the Graphic Lyceum, sebuah gereja, gedung teater dan tempat kebugaran David Lloyd, dan

<sup>4</sup> Organisasi ini merupakan mitra dari Rotterdam local government. Under the umbrella of the Rotterdam Climate Initiative, the Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs, DCMR Environmental Protection Agency Rijnmond (hereafter: DCMR) and the City of Rotterdam work as partners to enhance the sustainability of the city, the port and the industrial complex.

mengalami transisi energi terbarukan. Atap bangunan kota akan lebih hijau dan digunakan untuk menghasilkan energi surya sebanyak mungkin.

3. Pembangunan ekonomi yang didorong agar lebih kuat dan inovatif. Rotterdam adalah kota dengan kompleks pelabuhan yang efisien dan bersih, menjadikannya sebagai pusat dari ekonomi *bio-based* di Eropa. Salah satu cara organisasi mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan limbah sebagai sumber daya untuk pembuatan produk baru dan menghasilkan energi. Pada skala global, Rotterdam berada di garis depan bidang pengelolaan air dan teknologi delta. Ini menempatkan ekonomi *Clean Tech klaster* dalam posisi yang kuat sebagai salah satu pilar perekonomian Rotterdam.<sup>5</sup>

Kota berkelanjutan, baik sebagai ide maupun praktik (tindakan) dimaknai sebagai hal yang sangat ideal namun tidak mustahil dapat diwujudkan. Seperti pernyataan Clark II dan Vare (2010: 2) that “*sustainability is achievable. It can be done, and must be done, at the community level. Block by block, city by city, region by region, communities can change how they live.*” Bagi Rotterdam sendiri, salah satu kekuatan yang dimiliki dan disebutkan dalam beberapa hasil kajian para pemerhati kota berkelanjutan adalah kerjasama yang terjalin diantara para pemangku kepentingan di kota tersebut.

RCI dalam salah satu dokumen yang dipublikasikan (RCI, 2011: 47-65) menyebutkan bahwa seluruh elemen di kota Rotterdam diarahkan untuk bekerja sama secara komprehensif untuk mewujudkan ‘Rotterdam as The United Port City in 2042’. Mereka adalah penduduk, para pengusaha (pelabuhan, industri, pertokoan, properti, investor, developer, dan jasa transportasi), para ahli di bidang pendidikan (guru, dosen, dan akademisi), dan pegawai pemerintahan. Dengan demikian, kota berkelanjutan juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang tinggal di Rotterdam.

Website resmi pemerintah Belanda<sup>6</sup> menguatkan pernyataan RCI dengan menyebutkan bahwa Belanda memiliki tradisi yang panjang dalam proses konsultasi dan berjalannya kerja sama di lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi-organisasi pemangku kepentingan, dan warga masyarakat. Dalam kerangka pikir seperti ini, isu kebijakan di level nasional maupun internasional telah dipersiapkan oleh pemerintah lokal dan membentuk dasar dari aturan yang diratifikasi oleh Parlemen Belanda (*the Dutch Parliament*). Kebijakan yang terkait dengan propinsi-propinsi atau kotamadya-kotamadya dilimpahkan ke pemerintah di level-level tersebut supaya lebih dekat dengan masyarakat dan prinsip partisipasi publik dalam demokrasi.

Rotterdam sebagai *The United Port City* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2042 secara nyata menuntut kerja keras dan koordinasi yang baik. Pemerintah kota menyebarkan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat bahwa ‘sustainability’ menjadi sangat penting mengingat secara geografis kota ini berada di bawah permukaan laut dan sangat rentan terhadap bencana banjir yang disebabkan oleh pasangnyanya air laut. Hal ini kemudian diperkuat oleh hasil-hasil kajian para akademisi tentang Rotterdam.

Namun demikian, banjir bukanlah satu-satunya ancaman bagi masyarakat Rotterdam karena banyak pula tantangan lain, seperti penyediaan infrastruktur kota yang lebih baik. Oleh karena itu, hingga tahun 2014 yang lalu, pemerintah kota Rotterdam menguraikan 10 tugas pokok yang harus dicapai dalam konteks kota berkelanjutan, yaitu menurunkan emisi CO<sub>2</sub>; menghemat energi; beralih ke

---

5 Online at <http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/uk/city>. Cited on December 10<sup>th</sup>, 2015.

6 Online at <http://www.government.nl/issues/environment/roles-and-responsibilities-of-provincial-government-municipal-governments-and-water-authorities>. Cited on November 25<sup>th</sup>, 2015.

energi terbarukan dan bahan-bahan mentah *biomass*; menstimulasi kendaraan dan transportasi ramah lingkungan; mengurangi polusi suara dan meningkatkan kualitas udara; menambah pepohonan dan daerah hijau in dalam kota; meningkatkan investasi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih berkelanjutan; meningkatkan dukungan publik untuk mewujudkan keberlanjutan dan mendukung pendidikan dan penelitian yang juga bersifat keberlanjutan; mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim; dan menstimulasi pembangunan berkelanjutan kota dan regional (RCI, 2011: 18).

### III. KOTA BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan yang menjadi subyek dalam penelitian adalah para akademisi (Institute of Housing and Urban Studies/IHS), aktivis NGO (*Vereniging Nederlandse gemeenten or Association of Dutch Municipalities/VNG*), pemerintah kota Rotterdam (*Gementee of Rotterdam City dan Rotterdam Climate Initiative/RCI*), dan swasta (*DCMR Milieudienst Rijnmond*) yang merupakan para pemerhati isu kota berkelanjutan di Rotterdam. Pengumpulan data dilakukan selama 10 hari dengan metode wawancara semi-terstruktur selama kurang lebih 2 jam dengan masing-masing informan.

Dari beberapa informan yang penulis temui, hampir semua mengatakan bahwa ‘kota berkelanjutan’ merupakan konsep ideal yang tidak mudah diimplementasikan. Dari beberapa wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kota berkelanjutan bukanlah tujuan melainkan proses yang harus terus dijalankan. Sebagai bagian dari pembangunan, kota berkelanjutan diimplementasikan dalam berbagai program, baik berskala regional, nasional, maupun lokal. Salah satu hal menarik terkait dengan berjalannya program tersebut akademisi dari IHS, Veronica Olivotto, yang menyebutkan bahwa program yang diimplementasikan masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek fisik, sementara aspek non-fisik seperti inklusi sosial masih butuh banyak perhatian.

*“Rotterdam focuses mostly on physical planning of the city in relationship to climate change. To counter the risk of heat stress, increase water quality, and also energy mixed, etc. Social inclusiveness is not the strong point of RCI strategy. There’s not much attention to watch inclusiveness, for example about how do we take care people mentally, vulnerable or not and how to increase their quality of life.” (Interview on April 22<sup>nd</sup>, 2015).*

Sementara itu, Rochecouste dan Pearson (2014: 44) menegaskan bahwa komposisi utama dari kota berkelanjutan adalah *people and place*. Apabila kita memulai dengan teknologi, maka yang akan kita peroleh hanya teknologi. Apabila kita memulai dengan *design*, maka yang akan kita peroleh hanyalah rancangan semata. Tetapi apabila kita memulainya dengan *people dan place* dan di mana kita saat ini (konteks kekinian), maka kita akan mampu membuat perubahan nyata dan mengubah kehidupan orang lain.

Informan lain yang merupakan bagian dari sebuah organisasi non-pemerintah (VNG), Ludger Nieman, dalam wawancara tanggal 23 April 2015 juga menyatakan bahwa predikat sebagai ‘kota berkelanjutan’ bagi Rotterdam masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Nieman mengatakan bahwa penyediaan infrastruktur bagi masyarakat di Rotterdam masih dirasakan beberapa kekurangan, seperti kualitas air minum yang belum terlalu baik. Ia juga mengingatkan bahwa sebagai peneliti, sebaiknya tidak terlalu meyakini hasil survey (ranking kota berkelanjutan) sebuah lembaga karena bagaimanapun survey tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan lembaga yang bersangkutan.

Banyaknya komponen atau indikator untuk menilai sebuah kota memiliki keberlanjutan atau tidak menjadi hal yang harus diperhatikan dengan jeli. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan



survey atau menganalisis hasil survey yang dilakukan oleh sebuah lembaga, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa predikat sebagai kota berkelanjutan bagi Rotterdam cukup mengejutkan. Paling tidak hal ini dikemukakan oleh Olivotto. Ia mengatakan bahwa peringkat ke-5 Rotterdam sebagai kota berkelanjutan di Eropa menurut Arcadis<sup>7</sup> sulit dipercaya mengingat selama ini dalam pengamatannya pemerintah lebih menitikberatkan pada perencanaan fisik dan kurang mempertimbangkan aspek *work lives balance*.

Höjer, Gullberg, and Pettersson (2011: 7) menyatakan bahwa ada risiko yang sangat nyata melekat dalam pertumbuhan perkotaan dan perluasan gaya hidup urban, yaitu bahwa dari penggunaan sumber daya yang terus meningkat dan beban lingkungan jauh melampaui apa yang dikelola oleh alam. Kebalikan yang diinginkan adalah sebuah kota ekologis yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, mereka mendefinisikan kota sebagai tempat dimana para penghuninya bisa hidup dengan baik dengan cara mempertahankan kelestarian dan mencegah kehancuran sumber daya kolektif serta meninggalkan sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang tanpa perubahan nyata yang lebih buruk. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan juga mengandaikan bahwa gaya hidup perkotaan tetap diterima secara sosial dan finansial yang memuaskan. Namun, penekanan utama dalam pemahaman mereka tentang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah pada pemanfaatan sumber daya rumah tangga dan bagaimana struktur perkotaan, lembaga, dan pola hidup dapat dimanfaatkan untuk berkolaborasi mengelola pemanfaatan sumber daya dalam batas yang dapat diterima.

Tidak jauh berbeda dengan Rotterdam, di Jakarta istilah pembangunan kota berkelanjutan juga hanya populer di kalangan akademisi atau profesional yang berkecimpung di masalah perkotaan. Selain penggunaan istilah yang menurut penulis kurang “membumi”, kota berkelanjutan juga sarat dengan kepentingan negara-negara maju atau negara dunia pertama. Muluk (2014) dalam tulisannya berjudul “Analisis Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017” juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sendiri belum membuat definisi atau pengertian yang jelas mengenai pembangunan berkelanjutan yang relevan dan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah mengingat konsep tersebut mulai diadopsi sejak tahun 1997 dari dokumen *National Sustainable Development Strategy* (Agenda 21). Indonesia belum menerjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan secara jelas dalam dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>8</sup>

Dalam kajian lain tentang pembangunan kota berkelanjutan, Wardhono dan Hesti (2012) menganalisis bahwa untuk mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan, pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Peran serta aktif masyarakat dan kerjasama dengan swasta sangat penting dalam pembangunan karena Jakarta memiliki problematika ekonomi, sosial, pemerintahan, dan lingkungan yang sangat serius. Upaya Jakarta untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan juga tidak dapat dilepaskan dari peran wilayah atau kota-kota penyangga di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

---

7 Lembaga survey di Eropa dengan nama resmi Arcadis NV. Arcadis NV is a global design, engineering and management consulting company based in the Zuidas, Amsterdam, Netherlands. It has its origins in 1868. The company is a member of the Next 150 index. Arcadis has over 300 offices in 40 countries (<https://www.arcadis.com/en/global/>).

8 Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 misalnya konsep pembangunan berkelanjutan disebutkan sebagai salah satu dari 3 prinsip pengarusutamaan yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Tidak ada sebuah pernyataan yang jelas mengenai apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan selain menambahkan kata “berkelanjutan” dalam semua hal (Muluk, 2014).

Sementara itu, pembangunan kota berkelanjutan dimaknai sebagai proses menuju kota yang mandiri oleh swasta di Jakarta.<sup>9</sup> Dengan kata lain, kepentingan ekonomi pihak swasta harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial-budaya dalam implementasi pembangunan kota berkelanjutan. Tentu saja hal ini bukan tanpa tantangan dan hambatan karena seringkali kepentingan-kepentingan itu tidak berjalan harmonis. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia atau Jakarta khususnya untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dalam diskusi yang sama, Deputy Pengembangan Regional, Bappenas, Arifin Rudianto menegaskan bahwa untuk menyiapkan kota-kota secara berkelanjutan diperlukan adanya intervensi kepada kota-kota menuju masa depan yang berkelanjutan, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, orientasi kebijakan wilayah dan sektor, pembiayaan, kelembagaan.<sup>10</sup>

#### **IV. MEMBACA PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN TENTANG KONSEP KOTA BERKELANJUTAN: *GOVERNMENTALITY***

Gerak ide dan praksis para pemangku kepentingan tentang pembangunan kota berkelanjutan terlihat dalam diskusi-diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan yang penulis ikuti baik di Rotterdam maupun Jakarta. Seperti telah dideskripsikan di bagian sebelumnya bahwa ide tentang pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya mencantumkan pembangunan kota berkelanjutan berasal dari negara-negara maju yang telah mengalami kondisi yang ideal.

Kota, sebagai entitas yang terus mengalami dinamika yang luar biasa di hampir seluruh penjuru dunia, menjadi pusat perhatian banyak ahli, profesional, dan akademisi untuk mempelajarinya. Hampir semua hasil penelitian tentang kota menunjukkan bahwa masyarakat dunia tidak mungkin menutup mata tentang kenyataan dalam kurun waktu yang tidak lama lagi kota menjadi tempat hidup bagi lebih dari 75% manusia di dunia. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa beratnya beban kota.

Menariknya adalah kota akan terus bermunculan dan disesaki oleh orang-orang yang datang dari desa atau pinggiran kota sehingga kiranya konsep kota selalu relevan disandingkan dengan pembangunan. Kaitannya dengan itu, penulis mencoba menganalisis pernyataan-pernyataan yang muncul dari para informan yang menunjukkan cara mereka memandang ‘kota berkelanjutan’. Kota menjadi tempat di mana banyak hal harus diperbaiki atau ditambah. Di sinilah konsep ‘pembangunan’ dan ‘pemerintah’ menyertai. Kondisi yang dianggap sebagai ‘fakta’ dari kota seperti kualitas lingkungan yang buruk, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, atau masih kurangnya infrastruktur publik yang memadai harus ‘diperbaiki’ karena perhatian pemerintah dalam pembangunan adalah *the well-being of populations at large* (Li, 2007: 5).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ada kepentingan yang lebih global sifatnya. Kota-kota di negara Eropa dan Amerika Utara telah menerapkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka, mengurangi penggunaan sumber daya, dan mengurangi

---

9 Melalui pembangunan Kota Baru Jababeka, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jababeka Tbk, Hyanto Wihadhi, memaparkan bahwa prinsip pembangunan kota berkelanjutan terimplementasi dalam bentuk kota mandiri di mana seluruh kebutuhan warga kota dapat dipenuhi dan diakses dengan mudah di satu lokasi. Kota mandiri dalam konsepnya juga memperhatikan kaidah-kaidah kota berkelanjutan yang sangat memerhatikan kelestarian lingkungan. “Listrik kami ada pembangkit sendiri, kemudian ada pengolahan air limbah terpadu, ruang terbuka hijau, bangunan ramah lingkungan dan lainnya,” ujar Hyanto (akses online <http://bpiv.pu.go.id/article/detail/kota-berkelanjutan-dinilai-solusi-masa-depan-dalam-menghadapi-meningkatnya-urbanisasi>).

10 Dikutip dari artikel berjudul “Kota Berkelanjutan Dinilai Solusi Masa Depan dalam Menghadapi Meningkatnya Urbanisasi” yang diakses secara online dalam <http://bpiv.pu.go.id/article/detail/kota-berkelanjutan-dinilai-solusi-masa-depan-dalam-menghadapi-meningkatnya-urbanisasi>.

limbah (Satterthwaite, 1997: 1667). Kendati demikian, pembangunan masih menjadi konsep yang perlu dikritisi. Aliran developmentalisme yang ‘dipenetrasi’ oleh lembaga-lembaga donor seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, atau *International Monetary Fund* (IMF), yang hanya berarti bagi negara-negara yang dilabeli sebagai negara sedang berkembang (*underdevelop country*), pada kenyataannya hampir tidak pernah berhasil merubah kondisi negara yang semula berada dalam kondisi sedang berkembang menjadi sudah berkembang atau bahkan maju. Kata ‘pembangunan/*development*’ sendiri lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sehingga ‘wujud’ pembangunan di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, lebih banyak berupa pembangunan fisik infrastruktur dan kemajuan dalam statistik sehingga keberhasilan pembangunan harus selalu bisa dikalkulasikan dengan angka.

Dengan merujuk pada konsep-konsep yang dibawa dalam *The Will to Improve*, yaitu *governmentality*, *development*, dan *the practice of politics*, penulis berusaha memahami bahwa kehendak untuk mengembangkan pada kenyataannya tidak pernah menghasilkan apa yang dikehendaki sehingga Li ingin menunjukkan bahwa ada kontradiksi dalam agenda yang diusahakan dan sesuatu yang dihasilkan. Hal menarik lain adalah tawaran Li untuk melihat lebih dalam ke aspek *practice of politic*, proses-proses yang terjadi sehingga persoalan-persoalan kemiskinan dan sosial lainnya, sebagai justifikasi dilakukannya pembangunan, di negara-negara dunia ketiga tidak hanya didekati dari aspek teknis, prosedural, dan non-politis, seperti yang dilakukan oleh para donor internasional. Konsep “*rendering technical*” kemudian digunakan oleh Li sebagai *a short hand for what is actually a whole set of practices concerned with representing* (2007: 7). Dengan kata lain, penulis mencoba mengkaji bahwa logika/rasionalisasi skema pembangunan tidak mungkin dapat dipahami secara komprehensif apabila hanya melihatnya sebagai proses yang bersifat teknis tadi.

Konsep *governmentality* yang diangkat Foucault merupakan gambaran model relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat modern kini. Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *sovereign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna, yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika *disciplinary power* objeknya adalah tubuh individu, maka *governmentality* subjeknya adalah pada populasi (tubuh sosial).

Konsep yang juga menarik diangkat oleh Li dalam analisisnya adalah *trustees*,<sup>11</sup> yang kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari isu pembangunan di Indonesia. Semenjak abad ke-19, pembangunan selalu melibatkan pejabat kolonial dan misionaris, politikus dan birokrat, pemberi bantuan internasional, ahli-ahli pertanian, kesehatan, pemberi kredit, dan konservasi, serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang beraneka ragam. Merekalah yang disebut sebagai *trustees*. Penulis meminjam istilah ini untuk memetakan para aktor yang aktif berkampanye atau menyebarkan wacana tentang pembangunan kota berkelanjutan. Baik di Rotterdam maupun Jakarta, para ahli, profesional (pemerintah maupun swasta), akademisi, NGO yang bekerjasama dengan pemerintah, maupun komunitas pro-pembangunan adalah *trustees* yang dipercaya untuk memastikan jalannya pembangunan kota berkelanjutan sesuai

---

11 Orang-orang yang dipercaya dalam menjalankan program-program pemerintah.

dengan petunjuk yang diberikan. Dalam konteks kota berkelanjutan, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan menjadi payung yang diadopsi oleh seluruh negara yang mengikuti pertemuan di tingkat internasional.

Sebagaimana program pembangunan yang telah diadopsi oleh Indonesia, pembangunan berkelanjutan menawarkan tujuan yang sangat mulia, yaitu kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang lebih hijau, tingkat kesehatan dan kemakmuran yang lebih tinggi, dan keberlangsungan atau keberlanjutan hidup. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan cara-cara yang berbeda. Pada level masyarakat secara luas, pemerintah tidak mungkin memaksa dan mengatur secara detil tindakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya yang 'lebih halus' seperti mendidik kehendak dan merancang kebiasaan, aspirasi/keinginan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dikondisikan untuk mengikuti 'kehendak' pemerintah seolah-olah berdasarkan keinginan mereka sendiri, seperti dikatakan oleh Li (2007: 5) "artificially so arranging things so that people, following only their own self-interest, will do as they ought." Salah satu pilar dalam pembangunan kota berkelanjutan adalah partisipasi aktif warga masyarakat. Pemerintah, lembaga donor, para ahli (termasuk NGO), dan akademisi bekerjasama untuk mendorong partisipasi ini melalui program pemberdayaan.

Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh kaum intelektual dan *trustee* tidaklah berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh Li bahwa para aktivis Indonesia terlibat dalam politik secara kritis untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam populasi yang mereka dukung. Dukungan yang diberikan bersifat teknis, terkait dengan masalah menginstruksi orang dalam praktik politik yang tepat. Mereka sekaligus menjadi *programmer*. Mereka berbagi dalam "the will to improve", dan lebih khusus, *the will to empower*. Visi tentang peningkatan yang mereka miliki melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengklaim hak dan melakukan tugas sebagai warga negara yang demokratis (Li, 2007: 24-25).

*Governmentality* merupakan mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam relasi kekuasaan. Artinya, ia bukan hanya gambaran bagaimana negara mengontrol masyarakat atau bagaimana negara mengendalikan populasi dengan memanipulasi pengetahuan dan kebenaran, atau gambaran mengenai bagaimana populasi dapat menghasilkan praktek yang dikehendaki oleh negara. *Governmentality* merupakan gambaran tentang mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam setiap relasi sosial sehingga tidak bisa direduksi sebagai manifestasi relasi masyarakat dengan negara. Relasi sosial antar individu juga dapat merefleksikan mekanisme *governmentality*. Terlebih lagi upaya mengidentifikasi berlangsung tidaknya mekanisme *governmentality* melalui ada tidaknya perlawanan kelompok subordinat terhadap kelompok dominan merupakan bentuk simplifikasi mekanisme itu.<sup>12</sup>

Pembangunan, melalui upaya yang dilakukan oleh *trustees* yang menjalin kerja sama dalam *trusteeship* yang memiliki kehendak yang membangun atau meningkatkan taraf hidup populasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan, sungguh-sungguh merupakan utopia. Dengan *power* yang dimiliki, *trustees* membentuk relasi antar-subyek yang menurut Foucault ternyata semakin dipengaruhi oleh negara. Maka relasi kekuasaan yang berlangsung dalam setiap relasi sosial sesungguhnya inheren di dalamnya pengaruh kepentingan-kepentingan negara. Selanjutnya Foucault mengatakan bahwa relasi kekuasaan kini sudah semakin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Inilah

---

12 Mughis M, Abdil. 2009. Politik Kebudayaan: Manufakturisasi Subjek pada Kasus Lumpur Lapindo. Online di <http://www.pesantren-ciganjur.org/bwiCMS/bwiPrint.php?id=111>.

mengapa kemudian Foucault menyebut model relasi kekuasaan itu dengan *governmentality* karena memang relasi kekuasaan semakin *governmentalized*.

Kekuasaan-kekuasaan (*powers*) yang bersifat multipel tidak dapat ditotal dan terlihat mulus. Inilah pengamatan yang sangat penting menurut Li (2007: 25-26). Keberagaman kekuasaan, beragam cara praktik memosisikan orang, cara-cara yang beragam “*playing across another*” menghasilkan *gaps* dan *contradictions*. Para subyek yang terbentuk dari matrik-matrik ini menemui ketidakkonsistenan yang memberikan kemungkinan bagi pandangan yang kritis. Kemudian, kekuatan dirasakan bersifat memencar atau menyebar, atau bahkan tidak dirasakan sebagai kekuasaan sama sekali, dapat menjadi subyek dari kesadaran kritis. Tentu saja, menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja, *unsettling truths*, dengan demikian dapat diteliti dan dikontestasi sebagaimana agenda politik menurut Foucault maupun Gramsci.

Dengan demikian, untuk memahami skema pembangunan yang merupakan kehendak untuk mengembangkan (*the will to improve*), tidak hanya berhenti pada bagaimana pemerintah menunjukkan ‘mekanisme’ bekerja atau praktik-praktik yang diwujudkan dalam kebijakan (*policy*), peraturan, dan lain-lain, serta kendali melalui *trusteeship* tetapi juga praktik-praktik politik yang dilakukan oleh *trustees*. Namun ‘*conduct of conduct*’ bukan hanya semata-mata praktik yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menyangkut praktik politik yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar *trustees*, termasuk masyarakat yang menjadi subordinat.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Membaca perspektif pemangku kepentingan (*trustees*) di Rotterdam dan Jakarta menarik dilakukan untuk memahami gerakan ide dan praksis pembangunan kota berkelanjutan di 2 kota tersebut. Pemangku kepentingan yang menjadi sumber informasi adalah pemerintah dan elemen lain seperti akademisi, NGO, dan swasta. Penulis menyadari bahwa keberagaman data masih kurang lengkap karena belum mendatangi warga masyarakat, namun hal ini dijumpai oleh informasi dari NGO yang menaruh perhatian terhadap aspek demokratis kerja pemerintah lokal sehingga diharapkan adanya keseimbangan interpretasi terhadap berjalannya kebijakan pemerintah.

Pemetaan tentang perspektif para pemangku kepentingan dilakukan oleh penulis untuk mempelajari bagaimana ide dan praktik kota berkelanjutan berjalan di Rotterdam. Kota yang mendapat penghargaan dari beberapa lembaga tersebut kemudian diakui secara internasional berhasil menginspirasi banyak kota di dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman perubahan iklim yang lebih besar dan luas. Beberapa solusi yang dinilai inovatif tersebut mengedepankan nilai utama yang kemudian menjadi *mainstream*, yaitu berkelanjutan. Inilah yang berusaha ditelusuri oleh penulis melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan selama beberapa hari di lokasi penelitian.

Hal yang dapat dirangkum dari seluruh informan adalah ‘kota berkelanjutan’ adalah konsep besar yang sifatnya ambisius meskipun informan yang menjadi bagian dari pembuat kebijakan sangat optimis dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Kendati demikian, informan lain seperti akademisi atau aktivis NGO lebih mengkritisi cara kerja pemerintah yang cenderung menyederhanakan masalah sehingga mengesampingkan aspek sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah lebih mengutamakan keberhasilan yang terlihat secara kasat mata, seperti pembangunan *water plaza* yang dinilai tidak di



lokasi yang tepat sehingga kurang terlihat dan tidak setiap saat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat di sekitar bangunan tersebut.

Perbedaan perspektif juga terlihat dari cara informan merespon cara pemerintah mengimplementasikan kebijakan kota berkelanjutan. Menurut informan dari IHS, pemerintah kota Rotterdam masih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat fisik semata, padahal aspek non-fisik seperti pembangunan di bidang sosial-budaya juga penting untuk diperhatikan. Senada dengan informan tersebut, informan dari VNG menyangsikan hasil survey yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga survey internasional dengan mengatakan bahwa Rotterdam masih harus melakukan perbaikan di banyak fasilitas publiknya.

Sementara itu informan dari *gementee*, RCI, dan DCMR memandang bahwa Rotterdam cukup pantas disebut sebagai kota berkelanjutan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti keberhasilannya beradaptasi dengan perubahan iklim, kualitas air dan udara yang baik, dan partisipasi pihak swasta yang dinilai cukup memuaskan dalam mendukung program-program pembangunan kota berkelanjutan. Secara umum, predikat sebagai kota berkelanjutan dinilai tidak berlebihan bagi Rotterdam terlebih sejak kota ini berhasil membangun sistem pengelolaan air dan transportasi massal yang inovatif dan berkelanjutan.

Disisi lain, pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta menurut pandangan penulis masih belum menunjukkan hasil yang berarti meskipun konsep ini telah diadopsi oleh Indonesia sebelum tahun 2000. Pengimplementasian ide pembangunan masih terkendala aspek kebijakan, di mana Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas dan tegas tentang pembangunan kota berkelanjutan. Dengan dilakukannya diskusi-diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan yang beraneka ragam diharapkan arah pembangunan kota berkelanjutan menjadi lebih jelas dan disesuaikan dengan konteks dan karakteristik kota (wilayah) dan masyarakatnya.

Dari temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan dari para pemangku kepentingan mewarnai dinamika gerak ide dan praksis pembangunan kota berkelanjutan di Rotterdam maupun Jakarta. Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri adalah kota ini telah memulai persiapannya jauh sebelum konsep kota berkelanjutan mengemuka; paling tidak ini terlihat dari perjalanan sejarah perkembangan kota Rotterdam. Sebagai kota yang dekat dengan laut dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Belanda, Rotterdam sangat menyadari kekurangan yang dimilikinya. Namun terlepas dari berbagai macam kontra tentang implementasi kebijakan pemerintahnya, kota ini menunjukkan langkah yang lebih maju sehingga patut diikuti oleh kota-kota lain di dunia.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa konsep pembangunan kota berkelanjutan telah diadopsi selama hampir 3 dasawarsa, maka penulis merekomendasikan pentingnya dirumuskan kebijakan yang tegas dan jelas tentang arah pembangunan kota berkelanjutan. Secara empiris kota-kota di Indonesia memiliki karakteristik yang luar biasa beragam dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang juga berbeda-beda, maka pemerintah pusat maupun daerah (dalam konteks otonomi) seharusnya memiliki visi yang sama tentang pembangunan kota berkelanjutan. Dengan demikian, bukan hanya kota yang dikembangkan yang akan memperoleh manfaat dari pembangunan, tetapi juga kota-kota satelit atau wilayah-wilayah di sekitar kota sehingga cita-cita UUD 1945 tentang kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat sungguh-sungguh diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, II. Woodrow W, and Russel V, 2010; *Sustainable Communities*. New York.: Springer.
- Drilling, M. (2013). Planning Sustainable Cities: Why Environmental Policy Needs Social Policy. Isidor Wallimann (ed.). *Environmental Policy is Social Policy – Social Policy is Environmental Policy: Toward Sustainability Policy*. New York: Springer.
- Hassan, A.M. dan Hyowon Lee. (2014). “The paradox of the sustainable city: definitions and examples”. Online journal. Accessed on 20 February 2015.
- Heinen, K. (2014). Press release. Rotterdam Partners. 7 April 2014.
- Höjer, Mattias, Anders Gullberg, Ronny Pettersson. (2011). *Images of the Future City: Time and Space for Sustainable Development*. Dordrecht: Springer.
- Jenks, M. dan Colin J. (2010). *Issues and Concepts*. Mike Jenks and Colin Jones (eds.). *Dimensions of the Sustainable City*. UK: Springer.
- Li, T.M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. London: Duke University Press.
- Lundqvist, M. (2007). *Sustainable Cities in Theory and Practice: A Comparative Study of Curitiba and Portland*. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Karlstad Universitet.
- Muluk, S. (2014). Jakarta Menuju Kota yang Berkelanjutan: Analisis Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017. Diakses online [inisiatif.org/.../Jakarta-Menuju-Kota-yang-Berkelanjutan\\_Ipung.pdf](http://inisiatif.org/.../Jakarta-Menuju-Kota-yang-Berkelanjutan_Ipung.pdf),
- Natter, W. dan Wolfgang Zierhofer. (2002). Political Ecology, Territoriality, and Scale. *Geo-Jurnal*, 58: 225-231.
- Newman, P. and Isabella Jennings. (2008). *Cities as Sustainable Ecosystems: Principles and Practices*. Washington: Island Press.
- Rohecouste, G. and Leonie J.P. (2014). *Delivering Resilient, Sustainable Cities is All about People and Place*. Leonie J. Pearson, Peter W. Newton, and Peter Roberts (eds.). *resilient Sustainable Cities: A Future*. New York: Routledge.
- Rees, W.E. and Mathis Wackernagel. (1996). Urban Ecological Footprints: Why Cities Cannot Be Sustainable – And Why They are A Key to Sustainability. *Environmental Impact Assessment Review*, (16): 223-248. New York: Elsevier Science Inc.
- Rotterdam Climate Initiative (RCI). (2011). *Investing in Sustainable Growth*. Rotterdam Programme on Sustainability and Climate Change. Rotterdam: Doepel Strijkers Architects.
- Satterthwaite, D. (1997). “Sustainable Cities or Cities that Contribute to Sustainable Development?”. *Urban Studies*, 34(10): 1667-1691
- Wardhono, F. dan Hesti N. (2012). Pembangunan Kota Berkelanjutan. Presentasi sebagai bagian dari laporan akhir berjudul “Kajian Upaya Perwujudan Kota Jakarta yang Berkelanjutan”.

**Berita online:**

<http://www.government.nl/issues/environment/roles-and-responsibilities-of-provincial-government-municipal-governments-and-water-authorities>. Roles and responsibilities of provincial government, municipal governments and water authorities. Diakses tanggal 25 November 2015.

<http://bpiw.pu.go.id/article/detail/kota-berkelanjutan-dinilai-solusi-masa-depan-dalam-menghadapi-meningkatnya-urbanisasi>. Kota Berkelanjutan Dinilai Solusi Masa Depan dalam Menghadapi Meningkatnya Urbanisasi. Diakses tanggal 22 Agustus 2016.

<http://properti.kompas.com/read/2015/02/13/060000621/Jakarta.Sepuluh.Terbawah.Kota.Berkelanjutan.Dunia>.

<https://www.arcadis.com/en/global/>).

<http://www.rotterdamclimateinitiative.neluk/city>. cited on December 10<sup>th</sup>, 2015

<http://www.pesantren-ciganjur.org | bwiprint.php?id=112>